

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan transportasi sesuai misi dalam Rencana Strategik Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategik yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala triwulan dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja sasaran strategik Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat *outcome* atau *output* realisasi kinerja aktual tahun 2016 dengan target sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk prosentase.

Selain itu pengukuran kinerja mencakup pula beberapa capaian kinerja yang dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, *benchmarking* dan perbandingan kinerja aktual dengan standarnya atau standar pelayanan minimal (SPM) serta perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan rencana jangka menengah.

Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder melalui sistem informasi pengumpulan data kinerja. Data kinerja aktual berasal dari data kinerja Sekretariat, Bidang, Balai dan UPTD yang disajikan dalam Laporan Kinerja Bulanan yang diperlukan kemudian diolah, dievaluasi dan di analisis untuk memperoleh data realisasi kinerja yang relevan dengan sasaran strategik Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Formulir yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir pengukuran kinerja, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2016 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa Barat	100,00	72,59	72,59
3.	Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi	Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP	66,67	69,69	104,53
		Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat	74,29	72,83	98,03
		Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)	45,64	51,90	113,72
4.	Meningkatkan ketersediaan kelengkapan jalan di ruas jalan Provinsi	Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di jalan provinsi	21,00	20,03	95,38
RATA-RATA					105,59

Sumber : PK Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016,

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 105,59 %, yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian dari 9 indikator kinerja utama. Dari 4 (empat) sasaran tersebut, rata-rata sasaran dinyatakan **SANGAT BAIK** dengan kriteria capaian sasaran adalah 80 % sampai dengan 119 % dari target yang telah ditetapkan.

3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

Hasil pengukuran indikator kinerja terhadap target dan realisasi tahun 2015 dan tahun 2016 diperoleh data sebagai berikut :

TABEL 3.2
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2015 - 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Prosentase keikutsertaan kabupaten/ kota dalam WTN	Persen	44,44	44,44	55,56	59,26
2	Prosentase kepemilikan armada angkutan umum {AKDP} perseorangan menjadi badan hukum	Persen	25,17	21,80	50,12	75,00
3	Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat	Persen	91	88,11	94,00	94,00
4	Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang	Persen	78	77,70	79,00	78,80
5	Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa barat	Persen	100	71,92	100,00	72,59
6	Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di jalan provinsi	persen	19,00	19,06	21,00	20,03

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
7	Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP	Persen	60,61	58,98	66,67	69,69
8	Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat	Persen	73,56	72,83	74,29	72,83
9	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)	Persen	23,39	22,01	45,64	51,90

Sumber : Renstra (2013-2018), Renja, RKT dan PK Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel target dan realisasi indikator tersebut, bahwa realisasi Tahun 2016 rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015.

3.1.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

Hasil pengukuran terhadap Capaian indikator kinerja tahun 2015 dan tahun 2016 diperoleh data sebagai berikut:

TABEL 3.3
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2015 - 2016

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2015	Capaian Tahun 2016	Percepatan / Perlambatan
1	Prosentase keikutsertaan kabupaten/ kota dalam WTN	Persen	100,00	106,66	6.66
2	Prosentase kepemilikan armada angkutan umum {AKDP} perseorangan menjadi badan hukum	Persen	86,61	149,64	63.03
3	Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat	Persen	96,82	100,00	3.18
4	Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang	Persen	99,62	99,75	-0.13
5	Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa barat	Persen	71,92	72,59	-
6	Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di jalan provinsi	persen	100,32	95,38	-4.94
7	Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP	Persen	97,31	104,53	7,22
8	Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat	Persen	99,01	98,03	-0.98
9	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)	Persen	94,10	113,72	19.62
RATA-RATA			93,97	104,35	11.62

Sumber : Renstra (2013-2018), Renja, RKT dan PK Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Dari hasil perbandingan capaian kinerja tahun 2015 dan 2016 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dari 9 (sembilan) indikator kinerja mengalami pelambatan dan percepatan capaian kinerja, sebanyak 6 (enam) indikator mengalami percepatan dan indikator yang mengalami perlambatan sebanyak 3 (tiga) indikator.

3.1.4 Perbandingan Indikator Kinerja terhadap Realisasi Tahun 2013 - 2016 dengan Target Renstra Tahun 2018

Hasil pengukuran indikator kinerja terhadap realisasi Tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 dengan target Renstra Tahun 2018 diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 3.4
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2013 - 2016
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Target Renstra Tahun 2018	Capaian Terhadap Renstra 2018 (=7/8)
1	Prosentase keikutsertaan kabupaten/ kota dalam WTN	Persen	23,08	33,33	44,44	59,26	77,78	76.19
2	Prosentase kepemilikan armada angkutan umum {AKDP} perseorangan menjadi badan hukum	Persen	0,17	0,23	21.80	75,00	100	75.00
3	Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat	Persen	na	88	88,11	94,00	100	94.00
4	Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang	Persen	75,38	76,32	77,70	78,80	81	97.28
5	Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa Barat	Persen	72,89	71,80	71,92	72,59	100	72.59
6	Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di jalan provinsi	persen	15,83	17.02	19,06	20,03	25	80.12
7	Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP	Persen	48,48	54.55	58,98	69,69	78,79	88.45
8	Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat	Persen	72,83	72.83	72,83	72,83	75,76	96.13

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Target Renstra Tahun 2018	Capaian Terhadap Renstra 2018 (=7/8)
9	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)	Persen	8,47	11,94	22,01	51,90	78,99	100.00
RATA-RATA								87.57

Sumber : Renstra (2013-2018), Renja, RKT dan PK Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Berdasarkan tabel realisasi indikator kinerja Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 bahwa dari data 9 (ambilan) Indikator sasaran, rata-rata capaian tahun 2016 terhadap target akhir renstra Tahun 2018 adalah 87,57 %, sehingga Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat masih perlu mencapai realisasi sebesar 12,42 % agar capaian target pada akhir renstra Tahun 2018 mencapai 100 %, yang merupakan realisasi sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

3.1.5 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Analisa dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2016 dari Dinas Perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Sasaran Ke-1 = Meningkatkan kualitas pelayanan moda transportasi umum

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan peran serta Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan transportasi yang baik dan memastikan pengusaha mendapatkan keuntungan yang wajar. Dari dua hal yang bertolak belakang ini, titik berat (orientasi) pelayanan pemerintah adalah masyarakat pengguna.

Untuk menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan transportasi yang baik dan terjangkau daya beli, pemerintah mengawasi kepengusahaan transportasi yang terdiri dari tiga kriteria yaitu : kualitas (jenis pelayanan), kuantitas (jumlah armada) dan harga (tarif).

Penyediaan transportasi oleh negara seringkali diukur dan dilihat dari penyediaan infrastruktur pendukungnya seperti jalan, jembatan, terminal, tempat henti (*shelter*) dan lain-lain. Hal ini dalam ekonomi transportasi dipandang sebagai sisi sediaan (*supply*). Sedangkan disisi lain peningkatan jumlah kendaraan sebagai akibat dari peningkatan aktivitas masyarakat dianggap sebagai sisi permintaan (*demand*). Perubahan permintaan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, sebagai contoh pertambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian masyarakat sangat mempengaruhi peningkatan perjalanan.

Pembangunan Bidang Transportasi memegang peranan penting dalam pembangunan wilayah Jawa Barat yang cukup luas dengan topografi yang cukup bergelombang. Untuk mendukung pergerakan orang, barang di Jawa Barat diperlukan peningkatan pelayanan

transportasi. Berdasarkan data pada RKPD Jabar Tahun 2016 bahwa jumlah kendaraan baik kendaraan roda empat maupun sepeda motor mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat Jawa Barat terhadap alat transportasi cenderung meningkat. Berkaitan dengan bertambahnya jumlah kendaraan, pembangunan sarana jalan di Jawa Barat terus ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang transportasi dan perhubungan kepada masyarakat.

Masalah transportasi di kawasan perkotaan dapat berupa gangguan keselamatan dan kelancaran atau kemacetan lalu lintas, yang saat ini sudah sangat mengganggu aktivitas penduduk; yang mana kemacetan lalu lintas tersebut banyak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna jalan dan daerah sekitar jalan, baik ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan. Sebagai contoh, kemacetan lalu lintas akan berakibat meningkatnya biaya operasi kendaraan, kehilangan waktu, penurunan kenyamanan pengguna jalan dan penurunan kualitas udara serta peningkatan kebisingan di daerah sepanjang jalan.

Masalah lain yang tak kalah pentingnya ialah tingkat pelayanan angkutan umum. Angkutan umum, yang saat ini didominasi oleh angkutan bis dan Angkot masih terasa kurang nyaman, kurang aman dan kurang efisien. Angkutan massal (*mass rapid transit*) seperti kereta api masih kurang berfungsi untuk angkutan umum. Berdesak-desakan di dalam angkutan umum sudah merupakan pandangan sehari-hari. Pemakai jasa angkutan umum masih terbatas pada kalangan bawah dan sebagian kalangan menengah. Orang-orang berdesak-desakan masih enggan memakai angkutan umum, karena *comfortability* angkutan umum yang masih mereka anggap terlalu rendah, dibandingkan dengan kendaraan pribadi yang begitu nyaman dengan pelayanan dari pintu ke pintu. Sampai saat ini baru golongan masyarakat tingkat menengah ke bawah yang menggunakan jasa angkutan umum. Angkutan umum masih kurang menarik, karena masih terdapat kekurangan-kekurangannya, terutama dari segi : kenyamanan, keamanan, kecepatan, ketepatan, kemudahan, frekuensi dan jadwal keberangkatan serta fasilitas di terminal dan halte. Transportasi adalah barang umum (*public goods*) yang berarti menjadi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan transportasi yang baik, dan penyediaan transportasi yang baik ini adalah menjadi kewajiban pemerintah.

Sampai dengan tahun 2016, capaian kinerja Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2016 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Prosentase keikutsertaan kabupaten/ kota dalam WTN	55,56	59,26	106,66
Prosentase kepemilikan armada angkutan umum {AKDP} perseorangan menjadi berbadan hukum	50,12	75,00	149,64
Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat	94,00	94,00	100,00
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KE-1			118.77

Pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan moda transportasi umum dengan indikator kinerja Prosentase keikutsertaan kabupaten/ kota dalam WTN, Prosentase kepemilikan armada angkutan umum {AKDP} perseorangan menjadi berbadan hukum, dan Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat menjadi tugas pokok dan fungsi di Bidang Transportasi Darat

dan didukung juga oleh UPTD LLAJ Wilayah I Bogor – Purwakarta dan UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon – Priangan.

Evaluasi dan analisis atas capaian Indikator kinerja sasaran ke-1 adalah sebagai berikut :

1) Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN

Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan kepada kota-kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik. Penghargaan ini diberikan setiap tahun. Penilaian dilakukan atas kategori kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Aspek penataan transportasi yang berkelanjutan, dan berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan mendapat pertimbangan terbesar dalam penilaiannya.

Dari unsur-unsur yang dinilai tersebut, dapat mendorong kompetisi di Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menyediakan dan menata transportasi publik yang baik dan meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga keikutsertaan dalam Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (LLAK) atau Wahana Tata Nugraha (WTN) dengan melibatkan Kabupaten/kota di Jawa Barat sebagai pesertanya yang merupakan bagian dari program/kegiatan Kementerian Perhubungan dapat mendorong tercapainya transportasi publik yang baik di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Untuk meningkatkan pembinaan kesadaran berlalu lintas/Tiblantasi dan pengkoordinasian p

Perijinan trayek Antar Kota Dalam Provinsi di Jawa Barat maka peran serta dari keikutsertaan kabupaten/kota diperlukan, sehingga hasil kegiatan yang dilaksanakan adalah terselenggaranya pembinaan kesadaran berlalu lintas/Tiblantasi di Jawa Barat meliputi : terlaksananya Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (LLAK) atau Wahana Tata Nugraha (WTN) dengan melibatkan Kabupaten/kota di Jawa Barat sebagai pesertanya.

Sampai dengan tahun 2016 jumlah Kabupaten/kota yang ikut serta dalam WTN adalah sebanyak 15 dari 27 Kabupaten/kota di Jawa Barat atau 59,26 % dari target 55,56 % atau tercapai 106,66 %.

Dalam perhitungan prosentase Kab/Kota berpredikat WTN dilakukan dengan membandingkan jumlah kabupaten/kota yang menerima penghargaan WTN terhadap jumlah seluruh kab/kota di Jawa Barat dengan formulasi sebagai berikut:

$\% \text{ Realisasi Indikator Kinerja} = \frac{\text{Kab/Kota penerima WTN}}{\text{Jumlah Kabupaten Kota di Jawa Barat}} \times 100 \%$
--

Keikutsertaan Kabupaten/Kota di Jawa Barat akan terus didorong dari tahun ke tahun dan program/kegiatan yang terdapat pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang memberikan stimulus dan peran koordinatif dengan Kementerian Perhubungan.

Keberhasilan dalam pembangunan Perhubungan Provinsi Jawa Barat ditandai dengan untuk pertama kalinya mendapatkan Penghargaan Wahana Tata Nugraha. Wahana Tata Nugraha (WTN) merupakan penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah yang mampu menata transportasi dengan baik. Penilaian dilakukan atas kategori kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Untuk tingkat provinsi menerima Penghargaan Piala WTN Wiratama, sedangkan untuk kabupaten / kota menerima

piala berdasarkan kategori yaitu Piala WTN, Piala WTN kategori lalu lintas, piala WTN kategori angkutan dan plakat WTN.

Keberhasilan tersebut ditandai pula dengan di raih juga oleh 15 kabupaten / kota di Jawa Barat yaitu Piala WTN Kota Bandung, Kota Bogor dan Kota Sukabumi Piala WTN kategori Angkutan Kota Cimahi Piala WTN Kategori Lalu Lintas Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis Plakat WTN Kota Banjar, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut dan Kabupaten Purwakarta.

2) Prosentase kepemilikan armada angkutan umum (AKDP) perseorangan menjadi berbadan hukum

Berdasarkan pasal 138 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa :

1. Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau ;
2. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud ;
3. Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum ;

Lebih lanjut dalam pasal 139 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan :

1. Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota antar provinsi serta lintas batas negara ;
2. Pemerintah Daerah Provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi ;
3. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota ;
4. Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Sementara kondisi saat ini, angkutan umum sebagian besar masih dimiliki/ dikelola perseorangan atau manajemen perusahaan masih bersifat kekeluargaan (konvensional), dengan ciri-ciri antara lain :

- a. Bentuk perusahaan sebagian besar masih berbentuk Perusahaan Perorangan;
 - b. Sebagian besar jabatan di perusahaan dipegang oleh anak/keluarga tanpa mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki;
 - c. Aset perusahaan merupakan aset keluarga;
 - d. Investasi terbatas;
 - e. Kurang mengikuti perkembangan teknologi informasi;
- Kondisi tersebut mudah mengalami ;
- a. Perusahaan terpuruk ketika pemilik/orang tua meninggal ;
 - b. Terjadi pembagian aset perusahaan karena merupakan aset keluarga (Harta waris).

Sebagai upaya penataan angkutan jalan dalam hal ini angkutan umum antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tumbuhnya industri angkutan umum, dengan mengupayakan agar perusahaan angkutan berbadan hukum, perseroan terbatas (PT) atau koperasi;
- b. Menyelenggarakan pelayanan angkutan umum yang memiliki aksesibilitas tinggi dan bersifat massal dan memiliki standar pelayanan minimal (SPM) serta standar operasional prosedur (SOP);
- c. Adanya jaminan penyediaan jasa angkutan umum oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah terkait penyelenggaraan angkutan umum (subsidi, ekonomi, non-ekonomi);
- d. Menciptakan angkutan jalan yang aman, nyaman dan murah, sehingga mampu mendorong perekonomian bangsa;
- e. Memberikan pelayanan angkutan jalan ke seluruh pelosok negeri, melalui penyelenggaraan angkutan jalan perintis.

Upaya agar perusahaan angkutan berbadan hukum seperti perseroan terbatas (PT) atau koperasi tentu memerlukan kesungguhan dari semua pihak mengingat proses tersebut bukan merupakan proses sederhana dan mudah, karena saat ini ada kesalahan dalam pemahanan pelayanan transportasi, dalam hal ini pengusaha angkutan umum merasa telah memiliki ijin trayek dan dapat memperlakukan penumpang hanya untuk mendapatkan keuntungan saja, sementara kewajiban lainnya seperti wajib angkut penumpang, mengantar penumpang sesuai asal tujuan diabaikan apabila tidak menguntungkan.

Dan menyangkut kepentingan banyak pihak baik kepentingan di jalan maupun kepentingan dari tenaga kerja yang terlibat dalam angkutan umum yang ada saat ini. Oleh karena itu, inilah maksud yang melatarbelakangi indikator Prosentase kepemilikan armada angkutan umum {AKDP} perseorangan menjadi berbadan hukum, dijadikan sebagai salah satu indikator untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi khususnya AKDP di Jawa Barat.

Sampai dengan tahun 2016 jumlah ijin Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah sebanyak 23.184 ijin, atau sebesar 80,00 % dari target 50,12 % atau tercapai 75,00 %.

Berdasarkan data, jumlah izin Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 23.184 ijin di Provinsi Jawa Barat dan sampai dengan tahun 2016 jumlah izin Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang berbadan hukum sebanyak 17.388 ijin. Adapun formulasi perhitungannya sebagai berikut:

$\% \text{ Realisasi Indikator Kinerja} = \frac{\text{Jumlah ijin yang berbadan hukum}}{\text{Jumlah ijin AKDP di Jawa Barat}} \times 100 \%$

3) **Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat**

Sebagai implikasi dari perkembangan wilayah, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, teridentifikasi terjadinya ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* angkutan penumpang umum di Jawa Barat. Untuk menjamin ketersediaan pelayanan penumpang angkutan umum di Jawa Barat, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2011 telah melaksanakan kegiatan penyusunan pola jaringan dan simpul pelayanan angkutan penumpang umum di Jawa Barat.

Adapun dari Jaringan dan Simpul Pelayanan Angkutan terdapat dokumen hasil kegiatan Penyusunan Dokumen Penataan Angkutan Penumpang Umum di Jawa Barat yaitu untuk PKN Bandung Raya dan PKN Bodebek dan kegiatan Penyusunan Dokumen Kelembagaan Pengusahaan Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum dan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggara Angkutan Umum.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1532-Admrek/2011 tanggal 14 Nopember 2011 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi, di Provinsi Jawa Barat terdapat 286 ruas jalan Provinsi dengan panjang 2.191,290 Km. Ruas jalan provinsi tersebutlah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk dapat disediakan Angkutan Umum untuk melayani pergerakan masyarakat. Angkutan umum yang disediakan melalui tugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Kegiatan operasional pelayanan angkutan mobil penumpang umum yang melayani trayek antar kota dalam provinsi yang menghubungkan antar Ibukota Kabupaten atau Kota, Ibukota Kabupaten atau Kota dengan Ibukota Kecamatan, Ibukota Kecamatan dan atau dengan Desa serta menghubungkan antar kawasan perkotaan di Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan Operasional Angkutan AKDP, berdasarkan data yang ada pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, pelaksanaan operasional angkutan mobil penumpang umum Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dilayani oleh sebanyak 47.055 kendaraan.

Sesuai data di Bidang Transportasi Darat, dari ruas jalan Provinsi sepanjang 2.191 Km. yang belum terlayani angkutan penumpang AKDP sepanjang 454,72 Km, sehingga prosentase jalan yang belum terlayani AKDP adalah 20,75 %. Dengan demikian Prosentase jalan yang sudah terlayani AKDP adalah 79,25 %.

Dari ruas jalan Provinsi sepanjang 2.191 Km tersebut, dibutuhkan 47.055 kendaraan angkutan umum AKDP, dan telah tersedia sebanyak 44.051 kendaraan atau realisasi sebesar 94,00%, dari target sebanyak 94,00 %, dengan demikian capaian indikator ini sebesar 100 % pada tahun 2016. Adapun formulasi perhitungannya sebagai berikut:

Jumlah kendaraan AKDP

% Realisasi Indikator Kinerja = ----- X 100 %

Jumlah kebutuhan kendaraan AKDP

B. Sasaran ke-2 : Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum

Kegiatan pengembangan sistem e-enforcement di jembatan timbang Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan tujuan pengembangan e-enforcement yang terintegrasi dengan data Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten/Kota tidak dapat terlaksana karena dari hasil konsultasi kegiatan tersebut akan dikembangkan lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat baik system yang ada di PKB Kab/Kota maupun yang di Jembatan Timbang, sehingga kegiatan hanya dalam bentuk operasionalisasi perangkat system saja yang sudah terbangun di 3 JT dan evaluasi data perangkat system e-enforcement di PKB seluruh Jabar.

Sampai dengan tahun 2016, capaian Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target 2016 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang	79,00	78,80	99,75
Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa Barat	100,00	71,92	71,92
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KE-2			86,17

Pencapaian sasaran Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum dengan indikator kinerja Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang dan Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa barat menjadi tugas pokok dan fungsi di Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi (BSOT) dan didukung juga oleh UPTD LLAJ Wilayah I Bogor – Purwakarta dan UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon – Priangan.

Evaluasi dan Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1) Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang

Peranan Jembatan Timbang dalam sistem lalu lintas dan angkutan jalan sangatlah strategis terutama berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pengendalian sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009/LLAJ pasal 169 ayat (1) mengenai ketentuan angkutan barang tentang tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan dengan tujuan angkutan barang aman lancar dan terkendali sesuai pasal 3(a) UU nomor 22 Tahun 2009 LLAJ.

Dalam intensitas pengguna jalan oleh kendaraan yang sarat muatan sangat tinggi pada setiap ruas jalan, akibat muatan lebih tersebut menimbulkan dampak menurunnya tingkat pelayanan lalu lintas atau menurunnya *Level Of Servis (LOS)* suatu jalan sehingga dapat terjadi dampak ikutannya yaitu meningkatnya kecelakaan lalu lintas.

Pentingnya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku agar angkutan jalan lancar, selamat, tertib, terwujudnya etika budaya dan serta kepastian hukum bagi masyarakat maka Sub Unit PPKB Provinsi Jawa Barat atau biasa disebut Jembatan Timbang, melaksanakan :

- Penindakan kelebihan muatan melalui proses penindakan sangsi BAP3L (tilang) yang ditetapkan di Pengadilan Negeri setempat;
- Pengembalian kendaraan serta memberikan pengarahan dan pembinaan terhadap pengemudi kendaraan yang melanggar;
- Secara insidental dilaksanakan operasi gabungan kendaraan angkutan umum bersama unsur Dishub Kota/Kabupaten POLRI dan TNI.

Di Jawa Barat terdapat 8 (delapan) Jembatan timbang yang masih beroperasi, 4 (empat) Jembatan Timbang terdapat di wilayah kerja UPTD LLAJ Wilayah I Bogor-Purwakarta satu diantaranya tidak beroperasi yaitu jembatan timbang Bojong di Cianjur karena arus kendaraan barang dari arah Bandung memakai jalan lingkar Kota Cianjur dan 4 (empat) Jemabatan Timbang di Wilayah Kerja UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan. Dari Jembatan Timbang di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat ditampilkan data kendaraan yang melalui Jembatan Timbang pada tabel sebagai berikut :

TABEL3.5
DATA JUMLAH KENDARAAN YANG MELANGGAR DAN TIDAK MELANGGAR
PADA JEMBATAN TIMBANG TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

SUB UNIT PPKB	2015			2016		
	PELANGGARAN	TIDAK MELANGGAR	JUMLAH KENDARAAN	PELANGGARAN	TIDAK MELANGGAR	JUMLAH KENDARAAN
BALONGGANDU	15.142	179.168	194.310	9.148	93.652	102.800
KEMANG	9.097	41.714	50.811	4.666	21.574	26.240
BOJONG	36	36.452	36.488	0	0	0
CIBARAGALAN	10.835	70.947	81.782	9.977	37.797	47.774
TOMO	60.158	171.218	231.376	65.609	114.352	179.961
GENTONG	31.321	86.420	117.741	14.016	73.288	87.304
SINDANGGRASA	39.489	86.511	126.000	17.687	66.942	84.629
LOSARANG	96.474	247.530	344.004	27.748	146.507	174.255
Jumlah	262.552	919.960	1.182.512	148.851	554.112	702.963

Sumber : Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan data yang tersedia, sampai dengan tahun 2016, jumlah kendaraan yang melewati jembatan timbang s.d bulan Desember 2016 sebanyak 702.963 unit, dengan rincian jumlah kendaraan yang melanggar sebanyak 148.851 unit dan yang tidak melanggar sebanyak 554.112 unit. Sehingga realisasi indikator ini sebesar 78,80 % dari target 79,00 % atau tercapai 99,24 %.

Dalam perhitungan persentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jawa Barat dilakukan dengan menggunakan data hasil penimbangan pada 7 Jembatan Timbang di Jawa Barat, dengan formulasi perbandingan antara jumlah kendaraan yang tidak melanggar pada tahun 2016 terhadap jumlah kendaraan total yang di timbang selama tahun 2016 tersebut. Adapun formulasi perhitungannya sebagai berikut:

Jumlah Kendaraan yang tidak melanggar

% Realisasi Indikator Kinerja = ----- X 100 %

Jumlah Kendaraan yang melalui JT

Fungsi dan tugas Jembatan Timbang harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun sehingga kendaraan angkutan barang yang tidak melanggar makin meningkat, dan kendaraan yang melanggar semakin turun.

2) **Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa Barat**

Permasalahan transportasi di kawasan perkotaan dapat berupa gangguan keselamatan dan kelancaran atau kemacetan lalu lintas, yang saat ini sudah sangat mengganggu aktivitas penduduk. Kemacetan lalu lintas tersebut banyak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna jalan dan daerah sekitar jalan, baik ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan. Sebagai contoh, kemacetan lalu lintas akan berakibat meningkatnya biaya operasi kendaraan, kehilangan waktu, penurunan kenyamanan pengguna jalan dan penurunan kualitas udara serta peningkatan kebisingan di daerah sepanjang jalan.

Masalah lain tak kalah pentingnya ialah tingkat pelayanan angkutan umum. Angkutan umum, yang saat ini didominasi angkutan bus dan Angkot masih terasa kurang nyaman, kurang aman dan kurang efisien. Angkutan massal (*mass rapid transit*) seperti kereta api masih kurang berfungsi untuk angkutan umum. Berdesak-desakan di dalam angkutan umum sudah merupakan

pandangan sehari-hari. Pemakai jasa angkutan umum masih terbatas pada kalangan bawah dan sebagian kalangan menengah. Orang-orang berdasi masih enggan memakai angkutan umum, karena *comfortability* angkutan umum masih mereka anggap terlalu rendah, dibandingkan dengan kendaraan pribadi yang begitu nyaman dengan pelayanan dari pintu ke pintu. Sampai saat ini baru golongan masyarakat tingkat menengah ke bawah menggunakan jasa angkutan umum. Angkutan umum masih kurang menarik, karena masih terdapat kekurangan-kekurangannya, terutama dari segi kenyamanan, keamanan, kecepatan, ketepatan, kemudahan, frekuensi dan jadwal keberangkatan dan fasilitas di terminal dan halte.

Adapun usaha-usaha untuk Peningkatan Pelayanan Angkutan umum laik Jalan di Jawa Barat antara lain:

- Pengendalian dan pengawasan tanda pengesahan bagi armada umum AKDP di Jawa Barat, yaitu dengan Pendaftaran ulang 42.500 armada angkutan umum AKDP dan izin Angkutan laut sebanyak 329 kapal pedalaman dan angkutan udara sebanyak 15 perusahaan di Jawa Barat.
- Jumlah kendaraan wajib uji ada 495.188 unit kendaraan, setiap tahun setiap kendaraan wajib melakukan uji berkala sebanyak 2 kali, sehingga target kendaraan yang diuji sebanyak 990.376 kali unit kendaraan, sedangkan yang melakukan uji berkala kendaraan di kabupaten/kota se-Jawa Barat ada sebanyak 718.913 unit kendaraan sehingga realisasi indikator ini sebesar 72,59 % dari target 100% atau tercapai 72,59 %. Adapun formulasi perhitungannya sebagai berikut

$\% \text{ Pencapaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Kendaraan yang di Uji}}{\text{Jumlah Kendaraan Wajib Uji}} \times 100 \%$

Prosentase kendaraan yang melakukan uji berkala tersebut terealisasi sebesar 72,95 %, hal ini disebabkan antara lain kendaraan yang terdata di Jawa Barat yang wajib uji berkala tersebut, dapat melakukan uji berkala di tempat pengujian kendaraan bermotor di kota/provinsi lain, yang biasa disebut numpang uji. Provinsi Jawa Barat berdampingan dengan Provinsi DKI Jakarta, sehingga kemungkinan besar sebagian besar melakukan uji berkala ke tempat pengujian terdekat. Ada pula yang karena telah jatuh tempo atau habis masa uji berkalanya, namun sedang melakukan perjalanan, sebagai contoh kendaraan angkutan barang, dapat juga melakukan uji berkala di tempat terdekat tujuan pergerakan kendaraan tersebut. Atau kendaraan melakukan pengujian di luar Provinsi dan atau mutasi ke luar Provinsi tetapi tidak melapor.

Selain itu sebagaimana diketahui, sedang marak kasus pemalsuan buku uji, berdasarkan hasil pengawasan di Jalan, Jembatan Timbang dan Terminal.

Dengan demikian walaupun jumlah kendaraan yang wajib uji dan melakukan uji berkala sebanyak 72,95 %, tetapi kendaraan yang beroperasi di jalan harus dalam kondisi laik jalan.

C. Sasaran ke-3 : Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi

Pembangunan prasarana transportasi merupakan sebagian dari pembangunan Infrastruktur transportasi. Prasarana transportasi di Jawa Barat baik darat, laut dan udara masih relatif kurang dibandingkan dengan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap jasa layanan

transportasi, mengingat Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Sehingga dengan sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong meningkatkannya prasarana transportasi yang tersedia di Jawa Barat untuk mendukung pelayanan transportasi yang efisien.

Sampai dengan tahun 2016, capaian kinerja Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target 2016 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP	66,67	69,69	104,53
Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat	74,29	72,83	98,03
Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)	45,64	51,90	113,72
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KE-3			105.43

Pencapaian sasaran Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi dengan indikator kinerja **Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di jalan provinsi** menjadi tugas pokok dan fungsi di Bidang Transportasi Darat dan didukung juga oleh UPTD LLAJ Wilayah I Bogor – Purwakarta dan UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon – Priangan.

Untuk indikator kinerja **Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP** menjadi tugas pokok dan fungsi di Bidang Transportasi Laut dan ASDP dan didukung juga oleh Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan ASDP. Dan Untuk **Indikator Kinerja Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat** menjadi tugas pokok dan fungsi di Bidang Bina Sistem Operasional Trnasportasi (BSOT).

Kemudian untuk Indikator **Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)** menjadi tugas pokok dan fungsi di Bidang Transportasi Udara dan didukung juga oleh Balai Pengelolaan Bandar Udara.

Evaluasi dan Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1) Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP

Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk terbesar di Indonesia serta dengan kondisi geografis yang banyak gunung, lembah dan juga masih banyak daerah terpencil dan terisolir. Daerah terisolir di Jawa Barat ada yang dipisahkan oleh Danau atau Sungai. Daerah-daerah yang terisolir tersebut perlu juga mendapat layanan jasa transportasi untuk masyarakat yang membutuhkan. Salah satu layanan jasa transportasi tersebut adalah Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP).

Layanan transportasi ASDP memerlukan dermaga/pelabuhan sebagai simpul untuk naik dan turun penumpang/barang. Mengingat kondisi tersebut, perlu ketersediaan dermaga/pelabuhan di Jawa Barat untuk melayani masyarakat terhadap layanan transportasi ASDP.

Pada tahun anggaran 2016 untuk Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan ASDP di Jawa Barat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.183.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.172.224.600, atau 99,05 % dan fisik 100 %. Output kegiatan adalah penataan halaman kantor pos pengawasan kebon coklat, pembangunan kantor pos pengawasan pelabuhan galumpit, pembangunan garasi speedboat di pelabuhan Tanggul Usman, Pembangunan garasi speedboat di Pelabuhan Kalipucang. Outcome Kegiatan Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan penyebrangan dan ASDP di Jabar .

Jumlah dermaga yang ada saat ini sebanyak 23 dermaga sedangkan kebutuhan dermaga ASDP di Jawa Barat sebanyak 33 dermaga. Dengan demikian prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan di Jalan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2016 realisasinya sebesar 69,69% dari target yang ditetapkan 66,67 % dengan capaian kinerja 104,53%. Adapun formulasi perhitungannya sebagai berikut:

$$\% \text{ Realisasi Indikator Kinerja} = \frac{\text{Jumlah dermaga}}{\text{Jumlah kebutuhan dermaga}} \times 100 \%$$

Transportasi perkeretaapian mempunyai banyak keunggulan dibanding transportasi jalan, antara lain: kapasitas angkut besar (massal), cepat, aman, hemat energi dan ramah lingkungan serta membutuhkan lahan yang relatif sedikit. Dengan semakin kuatnya isu lingkungan, maka keunggulan kereta api dapat dijadikan sebagai salah satu alasan yang kuat untuk membangun transportasi perkeretaapian sehingga terwujud transportasi yang efektif, efisien dan ramah lingkungan. Keberpihakan pada pengembangan transportasi perkeretaapian berarti ikut serta dalam program penghematan energi dan peningkatan kualitas lingkungan.

Pembangunan transportasi perkeretaapian di Jawa Barat diharapkan mampu menjadi tulang punggung angkutan barang dan angkutan penumpang perkotaan sehingga dapat menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Daerah. Penyelenggaraan transportasi perkeretaapian Daerah yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan perekonomian. Oleh karena itu penyelenggaraan perkeretaapian di masa depan harus mampu menjadi bagian penting dalam struktur perekonomian.

Dengan semakin bertambahnya kebutuhan perjalanan akibat pertumbuhan penduduk dan ekonomi, sementara pembangunan transportasi berbasis jalan terkendala pengembangan lahan, maka menimbulkan eskalasi persoalan transportasi jalan. Moda kereta api dapat menjadi solusi dan menjadi tulang punggung angkutan barang dan angkutan penumpang sehingga dapat menjadi salah satu penggerak utama perekonomian. Pembangunan perkeretaapian Provinsi yang handal dan terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi perekonomian Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memerlukan suatu tatanan dan pedoman dalam pembangunan perkeretaapian Provinsi. Hal ini dapat terwujud melalui penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.

Tujuan penyelenggaraan perkeretaapian adalah untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan.

Guna menunjang mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan visi pembangunan transportasi wilayah Jawa Barat adalah Jaringan transportasi wilayah bertumbuh, merata, dan terpadu, dengan misi pembangunan transportasi wilayah Jawa Barat dalam rangka mewujudkan visi adalah meningkatkan jaringan pelayanan transportasi wilayah dan meningkatkan jaringan prasarana transportasi wilayah.

Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar-kota dimaksudkan untuk mengurangi beban angkutan orang di jalan. Dengan daya angkut yang besar, kereta api antar kota dapat menjadi moda transportasi utama yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan Nasional di Jawa Barat.

Sasaran dari pengembangan jaringan dan layanan kereta api adalah mewujudkan jaringan dan layanan perkeretaapian yang mampu meningkatkan pangsa pasar angkutan kereta api dan mampu mengakomodir kebutuhan layanan angkutan penumpang dan barang di Jawa Barat.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan penyelenggaraan perkeretaapian antara lain yaitu:

- 1) Lemahnya keberpihakan negara pada sektor kereta api, berimplikasi pada penganggaran dan kebijakan industri otomotif;
- 2) Persaingan antar moda baik dengan moda angkutan umum jalan, pesawat dan kendaraan bermotor pribadi yang semakin terjangkau;
- 3) Tingginya investasi infrastruktur, sarana dan operasional angkutan kereta api menyebabkan pihak swasta dan pemerintah daerah belum ada yang serius, mampu dan berani membuka layanan kereta api dalam daerah selain PT. KAI;
- 4) Pembenahan/penertiban asset jalur kereta api di daerah sebagai upaya reaktivasi.

Pengembangan jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota di provinsi Jawa Barat yang direncanakan sesuai rencana induk perkeretaapian di Jawa Barat, yaitu :

- a. Pengembangan pelayanan kereta api barang antar stasiun di Karawang dengan Pelabuhan Cilamaya.
- b. Pengembangan pelayanan kereta api penumpang antara Padalarang – Cicalengka.

- c. Pengembangan pelayanan kereta api penumpang antara Rancaekek – Tanjungsari
- d. Pengembangan pelayanan kereta api penumpang antara Bandung – Tanjungsari – Kertajati – Cirebon.
- e. Pengembangan pelayanan kereta api penumpang antara Bandung – Padalarang – Cianjur – Sukabumi – Bogor.
- f. Pengembangan pelayanan kereta api penumpang antara Bandung – Ciwidey.
- g. Pengembangan pelayanan kereta api penumpang antara Cirebon – Kadipaten – Kertajati.
- h. Pengembangan pelayanan kereta api penumpang antara Tasikmalaya – Cijulang – Pangandaran.
- i. Pengembangan pelayanan kereta api barang antara Bandung – Pelabuhan Cirebon.
- j. Pengembangan pelayanan kereta api angkutan barang antara Bandung – Pelabuhan Cirebon melalui shortcut Cibungur – Tanjungrasa.
- k. Pengembangan pelayanan kereta api angkutan barang antara Bandung – Tasikmalaya – Pangandaran.
- l. Pengembangan pelayanan kereta api angkutan barang antara Bandung – Padalarang – Cianjur – Sukabumi – Bogor.
- m. Pengembangan pelayanan kereta api angkutan barang antara Dry Port Gedebage Bandung – Pelabuhan Cimalaya.
- n. Pengembangan pelayanan kereta api angkutan barang antara Dry Port Cikarang – Pelabuhan Cilamaya.

Pada Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan melalui kegiatan Sinergitas Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat, METR Studi Transportasi Metropolitan Bodebek Karpur, METR Penyusunan FS Angkutan Massal Bandung - Lembang Berbasis Jalan Rel, METR Review FS dan Trase Kereta Api Tanjungsari - Bandara Kertajati – Arjawinangun, PPP Menyusun Rencana Induk Transportasi Terintegrasi di Pusat Pertumbuhan Pelabuhanratu Raya, PPP Menyusun Rencana Induk Transportasi Terintegrasi di Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya, PPP Menyusun Rencana Induk Transportasi Terintegrasi di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya, METR Menyusun FS Pembangunan Jalur Kereta Api Ciwidey – Rancabuaya, METR Menyusun FS Pembangunan Jalur Kereta Api Sukabumi – Pelabuhanratu, METR Penanganan Dampak Sosial dan Persiapan Pembebasan Lahan Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek-Tanjungsari dan Banjar- Pangandaran – Cijulang, sampai dengan tahun 2016, kondisi jaringan/panjang jalan rel eksisting di Provinsi Jawa Barat adalah 1.363,88 km, dari jaringan/panjang rel tersebut yang beroperasi adalah 993,29 km dan yang tidak beroperasi 370,61 km sehingga realisasi indikator Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat sebesar 72.83% dari target 74.29 % atau tercapai sebesar 98,03 %. Adapun formulasi perhitungannya sebagai berikut:

$\% \text{ Realisasi Indikator Kinerja} = \frac{\text{Panjang rel KA yang Aktif}}{\text{Panjang rel KA yang tersedia}} \times 100 \%$

3) Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)

Permasalahan dan tantangan dalam pelayanan transportasi udara pada umumnya, masih terbatasnya sarana dan prasarana jasa transportasi udara dan masih memerlukan dukungan investasi pemerintah dan swasta yang cukup besar dalam upaya menyelenggarakan pelayanan transportasi udara internasional dan domestik maupun kargo (Bandara Kertajati dan Nusawiru), hal ini perlu dilakukan agar penyelenggaraan jasa transportasi lebih efisien, akuntabel, kompetitif dan profesional.

Guna meningkatkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportasi udara perlu diatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang selama ini ada. Permasalahan tersebut di antaranya meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta penegakan hukum.

Transportasi udara, antara lain: Prasarana dan sarana bandar udara yang ada saat ini belum memadai untuk mengakomodir pergerakan orang dan barang melalui transportasi udara, baik domestik maupun internasional; Masih diperlukan dukungan investasi dari pemerintah dan swasta dalam mewujudkan bandara internasional di Jawa Barat.

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan pembangunan Bandara Internasional Kertajati Majalengka di dukung Kebijakan dasar pengembangan wilayah dan penataan struktur tata ruang Kabupaten Majalengka, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka 2005-2015 yang secara makro konsep wilayah pengembangan Kabupaten Majalengka dibagi menjadi 3 (tiga) Wilayah Pengembangan (WP) Utama dengan salah satu yaitu Wilayah Pengembangan (WP) Utara fungsi utama pengembangan Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Dengan terealisasinya Pembebasan lahan BIJB sebagai penyediaan sarana prasarana Pelabuhan Udara di Jawa Barat yang representatif diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan moda udara khususnya dari dan ke Jawa Barat.

Capaian ketersediaan/pencapaian penyediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan Pengembangan Bandara Nusawiru) sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. 926.444.493.594,- dan jumlah kebutuhan anggaran untuk pembangunan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru) sebesar Rp. 1.785.209.644.865,-.

Adapun Prosentase ketersediaan transportasi udara (Pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan bandara Nusawiru) realisasinya sebesar 51,90 % dari target 45,64% atau tercapai sebesar 113,72 %. Adapun formulasi perhitungannya sebagai berikut:

$\% \text{ Realisasi Indikator Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Pemb. Dan Pengemb. Bandara}}{\text{Kebutuhan Pemb. Dan Pengemb. Bandara}} \times 100 \%$

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa berdasarkan capaian dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2016, semua sasaran yang dirumuskan belum sepenuhnya dapat tercapai secara optimal. Hal ini diharapkan dapat mendorong seluruh

komponen Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan memberikan landasan atau acuan bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

D. Sasaran ke-4: Meningkatkan ketersediaan kelengkapan jalan di ruas jalan Provinsi

Pembangunan prasarana keselamatan jalan merupakan sebagian dari pembangunan Infrastruktur transportasi dengan, tingkat kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas keselamatan jalan.

Sampai dengan tahun 2016, capaian kinerja Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target 2016 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di jalan provinsi	21,00	20,03	95,38
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KE-3			95.38

Pencapaian sasaran Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi dengan indikator kinerja **Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di jalan provinsi** menjadi tugas pokok dan fungsi di Bidang Transportasi Darat dan didukung juga oleh UPTD LLAJ Wilayah I Bogor – Purwakarta dan UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon – Priangan.

Untuk indikator kinerja **Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP** menjadi tugas pokok dan fungsi di Bidang Transportasi Laut dan ASDP dan didukung juga oleh Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan ASDP. Dan Untuk **Indikator Kinerja Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat** menjadi tugas pokok dan fungsi di Bidang Bina Sistem Operasional Trnasportasi (BSOT).

Kemudian untuk Indikator **Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)** menjadi tugas pokok dan fungsi di Bidang Transportasi Udara dan didukung juga oleh Balai Pengelolaan Bandar Udara.

Evaluasi dan Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1) Prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di jalan provinsi

Sejalan dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 64/255 tanggal 10 Maret 2010 tentang *Improving Global Road Safety* melalui Program *Decade of Action for Road Safety* 2011-2020 yang telah dikuatkan dengan Instruksi Presiden Republik Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Keselamatan Jalan dalam rangka penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, keselamatan lalu lintas merupakan tanggung jawab kita bersama.

Dalam melaksanakan Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan yang meliputi 5 (lima) Pilar yaitu Manajemen Keselamatan Jalan, Jalan yang Berkeselamatan, Kendaraan yang Berkeselamatan, Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan, dan Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk melaksanakan Pilar Kedua: Jalan Yang Berkeselamatan adalah dengan program Perencanaan dan Pelaksanaan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Jawa Barat yaitu dengan meningkatkan pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas jalan di Jawa Barat berupa Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Pagar Pengaman Jalan dan Panerangan Jalan Umum (PJU) serta mendorong Kabupaten/ Kota di Jawa Barat untuk memenuhi Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Jalan Lokal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui bantuan keuangan kepada Kabupaten/ kota berupa pemenuhan fasilitas lalu lintas jalan.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan prasarana fasilitas lalu lintas jalan di Jawa Barat, pada Tahun 2016 Bidang Transportasi Darat dan UPTD telah melaksanakan beberapa kegiatan yang bersifat fisik yaitu pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas jalan di jalan Provinsi di Jawa Barat pada Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), dengan beberapa permasalahan dan solusi, diantaranya:

- (1) Dalam program ini, terdapat permasalahan yaitu fasilitas lalu lintas jalan yang ada dan telah terpasang masih menunjukkan kekurangan-kekurangan baik kuantitas maupun kualitasnya. Di sisi lain fasilitas perhubungan terpasang juga merupakan barang/benda sangat rentan terhadap kehilangan dan pencurian. Upaya pemecahan masalah yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas lalu lintas jalan dilaksanakan dengan selalu memonitor dan memberikan data akurat di lapangan dan memprioritaskan terhadap usulan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan serta mengusulkan peningkatan alokasi dana pada setiap tahun anggaran kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Usaha lain adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya fasilitas perhubungan untuk meningkatkan keselamatan penggunaan jalan;
- (2) Kegiatan pengadaan dan pemasangan Fasilitas lalu lintas jalan yang ada dan yang telah terpasang saat ini masih menunjukkan kekurangan dari sisi kuantitas. Di sisi lain fasilitas lalu lintas yang terpasang merupakan barang/benda yang sangat rentan terhadap pencurian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut solusi yang dilakukan adalah pihak Dinas Perhubungan akan mengusulkan secara bertahap kebutuhan fasilitas lalu lintas jalan pada ruas jalan provinsi di Jawa Barat setiap tahunnya dan mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan untuk menyempurnakan standar teknis fasilitas lalu lintas yang mempunyai nilai ekonomis rendah sehingga mengurangi resiko terjadinya pencurian.

Hasil pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat meningkatkan kelancaran dan kenyamanan berlalulintas dengan terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan khususnya pada ruas-ruas jalan provinsi di Jawa Barat, berupa pemasangan Rambu Lalu lintas PJU Solar Cell, Pagar Pengaman Jalan, marka jalan dan Laporan Hasil Updating dan inventarisasi/kebutuhan fasilitas kelengkapan jalan, laporan updating data tingkat pelayanan jalan provinsi dan laporan updating data rawan kecelakaan lalu lintas, maka peningkatan fasilitas lalu lintas di jalan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan keselamatan para pengguna jalan dan dalam sosialisasi dan pendidikan masyarakat untuk menuju tertib lalu lintas.

Sesuai data yang ada, pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Provinsi adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.6
JUMLAH FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN TAHUN 2012 - 2016

URAIAN	MARKA	PAGAR PENGAMAN JALAN / GUARDRAIL	RAMBU	PJU KONVEN SIONAL	PJU SOLAR CELL	Realisasi
satuan	m'	unit	unit	unit	unit	
Kebutuhan	6.061.000	80.925	24.373	38.486	16.494	
Terpasang s/d Tahun 2012	1.405.550	20.877	3.808	144	70	
Realisasi 2012	23,19%	25,80%	15,62%	0,37%	0,42%	13,08%
Terpasang s.d Tahun 2013	1.584.575	21.047	6.098	434	142	
Realisasi 2013	26,14%	26,01%	25,02%	1,13%	0,86%	15,83%
Terpasang s.d Tahun 2014	1.672.575	21.207	6.728	658	331	
Realisasi 2014	27,60%	26,21%	27,60%	1,71%	2,01%	17,02%
Terpasang s.d Tahun 2015	1.870.275	21.431	8.100	658	501	-
Realisasi 2015	30,86%	26,48%	33,23%	1,71%	3,04%	19,06%
Terpasang s.d Tahun 2016	1,978,075	21,525	8,743	766	501	
Realisasi 2016	32.64%	26.60%	35.87%	1.99%	3.04%	20.03%

Sumber : Bidang Transportasi Darat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data sampai dengan tahun 2016, prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Barat, realisasinya sebesar 20,03 % dari target yang ditetapkan 21,00 % dengan capaian kinerja 95,38%. Adapun formulasi perhitungannya sebagai berikut:

% Realisasi Indikator Kinerja =

Jumlah terpasang fas. kelengkapan jalan

Jumlah kebutuhan fas. Kelengkapan jalan

X 100 %

3.2 REALISASI ANGGARAN

Program pembangunan daerah, untuk Bidang Perhubungan yang merupakan Urusan Wajib ada 5 (lima) program yaitu sebagai berikut :

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
- e. Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor;

Selain program-program tersebut di atas, terdapat juga program di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang merupakan program penunjang dan kegiatan *fixed cost sebanyak 8 program* antara lain pada **Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Bidang Statistik dan Bidang Perencanaan Pembangunan** dengan program yaitu:

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- d. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

- f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah;
- g. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
- h. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 merupakan tindak lanjut dari kinerja yang telah dicapai pada tahun sebelumnya. Diharapkan pada periode tahun 2016 ini, target kinerja yang akan dicapai dapat mendorong perwujudan sasaran dan tujuan. Dan untuk mempersiapkan dan meletakkan dasar bagi tahap selanjutnya.

Program/ kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar merupakan kegiatan lanjutan dan atau berkelanjutan, secara garis besar misalnya :

1. Kegiatan yang menunjang pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Jawa Barat dan pengembangan Bandara Nusawiru;
2. Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan;
3. Pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan ASDP di Jawa Barat;
4. Dukungan pembangunan pelabuhan laut Internasional;
5. Lanjutan kegiatan dalam rangka pembangunan *Shortcut* Cibungur – Tanjungrasa serta dalam rangka reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat;
6. Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan perkeretaapian di Jawa Barat;
7. Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas, Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Pemilihan Perusahaan Terbaik.

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016 pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang mendukung indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagaimana dalam Tabel berikut ini :

TABEL 3.7
REALISASI PROGRAM/ KEGIATAN YANG
MENUNJANG INDIKATOR TAHUN 2016

Indikator	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
Prosentase Keikutsertaan Kabupaten/Kota Dalam WTN	Proram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Pemilihan Awak kendaraan Umum Teladan (AKUT), Wahana Tata Nugraha dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat	452,750,000.00	434,143,683.00	95.89	100.00
Prosentase Kepemilikan Armada Angkutan Umum (AKDP) Persesorangan menjadi Badan Hukum	Proram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Evaluasi Angkutan Penumpang Umum AKDP di Jawa Barat	550,200,000.00	158,752,796.00	28.85	28.87
Prosentase Ketersediaan AKDP di Jawa Barat	Proram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Pemeliharaan dan Pengoperasian CCTV	698,000,000.00	641,018,223.00	91.84	100.00
		Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Analisa Dampak Lalin di Jawa Barat	503,850,000.00	150,178,016.00	29.81	29.91
		Penataan Terminal Penumpang Umum Tipe B	279,525,000.00	216,782,598.00	77.55	80.26
		METR Penyusunan Rencana Detail Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Bandung Metropolitan Area	760,000,000.00	662,830,000.00	87.21	100.00
Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di jembatan timbang	Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	2,647,545,000.00	2,365,960,951.00	89.36	100.00
		Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan di Jawa Bara	1,290,200,000.00	1,050,556,687.00	81.43	81.43
Prosentase kendaraan umum laik jalan di Jawa Barat	Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor	Pembinaan dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor di Jawa Barat	432,835,000.00	187,337,319.00	43.28	43.29
Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan	Program Rehabilitasi dan Pameliharaan Prasarana	DAK Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan	3,432,170,916.00	3,245,424,200.00	94.56	100.00

Indikator	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di Jalan Provinsi	dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas di UPTD LLAJ Wilayah I Bogor	2,967,346,168.00	2,729,636,205.00	91.99	100.00
		Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas di UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan	2,500,730,000.00	1,728,303,970.00	69.11	85.08
		Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas di Jawa Barat	1,060,800,000.00	934,455,000.00	88.09	100.00
		METR Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Wilayah Metropolitan Bandung	2,636,100,000.00	1,353,299,000.00	51.34	65.70
		CLTH KKP Pembuatan Penunjuk Arah (Fasilitas LLAJ) Kawasan Ciletuh	200,000,000.00	197,418,031.00	98.71	100.00
Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dukungan Pembangunan Pelabuhan Laut di Jawa Barat	257,660,000.00	175,007,000.00	67.92	100.00
		Penyusunan DED Pelabuhan Penyeberangan di Indramayu dan Danau Jatiluhur Purwakarta	475,000,000.00	466,688,500.00	98.25	100.00
		Sosialisasi Keselamatan Pelayaran di Jawa Barat	172,300,000.00	167,370,750.00	97.14	100.00
		CLTH KKP Penyusunan FS dan Master Plan Pembangunan Dermaga Kapal Wisata (Teluk Palangpang)	707,967,500.00	686,230,500.00	96.93	100.00
		CLTH Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpuan Regional di Jawa Barat	258,275,000.00	256,578,000.00	99.34	100.00
		PPP Menyusun Rencana Induk Transportasi Terintegrasi di Pusat Pertumbuhan Pelabuhanratu Raya	197,040,000.00	172,674,000.00	87.63	100.00
		Sinergitas Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat	423,000,000.00	337,910,150.00	79.88	79.88

Indikator	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	METR Studi Transportasi Metropolitan Bodebek Karpur	374,170,000.00	340,152,250.00	90.91	100.00
		METR Penyusunan FS Angkutan Massal Bandung - Lembang Berbasis Jalan Rel	944,335,700.00	890,771,850.00	94.33	100.00
		METR Review FS dan Trase Kereta Api Tanjungsari - Bandara Kertajati - Arjawinangun	945,965,000.00	937,820,000.00	99.14	100.00
		PPP Menyusun Rencana Induk Transportasi Terintegrasi di Pusat Pertumbuhan Pelabuhanratu Raya	945,965,000.00	937,820,000.00	99.14	100.00
		PPP Menyusun Rencana Induk Transportasi Terintegrasi di Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya	945,965,000.00	937,820,000.00	99.14	100.00
		PPP Menyusun Rencana Induk Transportasi Terintegrasi di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya	945,965,000.00	937,820,000.00	99.14	100.00
		METR Menyusun FS Pembangunan Jalur Kereta Api Ciwidey - Rancabuaya	945,965,000.00	937,820,000.00	99.14	100.00
		METR Menyusun FS Pembangunan Jalur Kereta Api Sukabumi - Pelabuhanratu	945,965,000.00	937,820,000.00	99.14	100.00
		METR Penanganan Dampak Sosial dan Persiapan Pembebasan Lahan Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek-Tanjungsari dan Banjar-Pangandaran - Cijulang	945,965,000.00	937,820,000.00	99.14	100.00
Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	BIJB Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Bandara (BIJB) dan Kertajati Aerocity	268,830,000.00	240,749,000.00	89.55	100.00
		PPP Pengembangan Bandara Nusawiru Pangandaran Untuk Menunjang PON XIX	5,969,500,000.00	5,525,602,860.00	92.56	100.00

Indikator	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
pengembangan Bandara Nusawiru)		PPP Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis Terinci (RTT) Sisi Darat Bandar Udara Nusawiru Kab. Pangandaran	947,019,000.00	884,645,674.00	93.41	100.00
		BIJB Pembangunan Pagar BIJB di Kertajati	4,185,199,000.00	4,141,779,500.00	98.96	100.00
		PPP Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis Terinci (RTT) Sisi Udara Bandar Udara Nusawiru Kab. Pangandaran	940,379,000.00	856,294,404.00	91.06	100.00
		BIJB Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan BIJB Kertajati	496,302,000.00	421,007,250.00	84.83	100.00
		BIJB Pengamanan Aset Lahan BIJB di Kertajati	1,049,850,000.00	1,018,681,500.00	97.03	100.00
		Penyusunan Dokumen AMDAL Bandar Udara Nusawiru Kab. Pangandaran	753,005,000.00	659,055,361.00	87.52	100.00
		Proses Sertifikasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dipakai Bandara Nusawiru	892,300,000.00	436,928,749.00	48.97	50.45
		CLTH KKP Penyusunan Dokumen Feasibility Study (FS) Landasan Pacu Di Wilayah Jabar Selatan	399,364,000.00	345,508,000.00	86.51	100.00
		Sinergitas Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara di Jawa Barat	315,970,000.00	115,907,784.00	36.68	36.68
		Pembangunan Gedung Display BIJB di Kertajati	18,538,148,000.00	4,699,918,000.00	25.35	25.69
		Proses Sertifikasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dipakai BIJB	990,818,000.00	936,591,600.00	94.53	96.57

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

TABEL 3.8
REALISASI KINERJA DAN
ANGGARAN TAHUN 2016

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2016			Program	Keuangan		
			Target %	Realisasi %	Capaian %		Besar Anggaran DPPA (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi %
1	Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum	Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN	55,56	59,26	106,66	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	452,750,000.00	434,143,683.00	95.89
		Prosentase kepemilikan armada angkutan umum {AKDP} perseorangan menjadi berbadan hukum	50,12	75,00	149,64		550,200,000.00	158,752,796.00	28.85
		Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat	94,00	94,00	100,00		2,241,375,000.00	1,670,808,837.00	74.54
2	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum	Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang	79,00	78,80	99,75	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	12,797,147,084.00	10,188,536,406.00	79.62
		Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa barat	100,00	72,59	72,59	Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor	432,835,000.00	187,337,319.00	43.28
3	Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi	Prosentase ketersediaan dermaga/ pelabuhan ASDP	66,67	69,69	104,53	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	2,068,242,500.00	1,924,548,750.00	93.05
		Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat	74,29	72,83	98,03		8,363,260,700.00	8,133,574,250.00	97.25
		Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan	45,64	51,90	113,72		35,746,684,000.00	20,282,669,682.00	56.74

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2016			Program	Keuangan		
			Target %	Realisasi %	Capaian %		Besar Anggaran DPPA (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi %
		BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)							
4.	Meningkatkan ketersediaan kelengkapan jalan di ruas jalan Provinsi	Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di Jalan Provinsi	21,00	20,03	95,00	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	12,797,147,084.00	10,188,536,406.00	82.30

Sumber : Laporan Kinerja Bulanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Pencapaian Sasaran ke-1 **Meningkatkan kualitas pelayanan moda transportasi umum** di dukung oleh 1 program APBD, yaitu **Program Peningkatan Pelayanan Angkutan** yang terdiri dari 6 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,244,325,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 2,263,705,316.00 atau 69,77% dengan realisasi fisik sebesar 73.35 %.

Pencapaian Sasaran ke-2 **Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum** di dukung oleh 2 program APBD, yaitu **Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas** yang terdiri dari 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,937,745,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 3,406,517,638.00 atau 86,51 % sedangkan realisasi fisik mencapai 93.92 % dan **Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor** yang terdiri dari 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 432,835,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 187,337,319.00atau 43.28 % dengan realisasi fisik sebesar 13,04 %.

Pencapaian Sasaran ke-3 **Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi** ini di dukung oleh 1 program APBD, yaitu **Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**; yang terdiri dari 30 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44,534,967,200.00 dengan realisasi sebesar Rp. 27,877,928,292.00 atau 62,60 % dengan realisasi fisik sebesar 67,18 %

Pencapaian Sasaran ke-4 **Meningkatkan ketersediaan kelengkapan jalan di ruas jalan Provinsi** ini di dukung oleh 1 program APBD, yaitu **Program Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)** yang terdiri dari 6 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12,797,147,084.00 dengan realisasi sebesar Rp. 10,188,536,870.00 atau 79.62 % sedangkan realisasi fisik mencapai 90,02 %

3.3 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2016

Terdapat dari 3 (tiga) sasaran kinerja yang direncanakan, capaian kinerja indikator yang ≥ 100% hanya terdapat 5 indikator yaitu Prosentase keikutsertaan kabupaten/ kota dalam WTN dengan capaian 106,66 %, Prosentase kepemilikan armada angkutan umum {AKDP} perseorangan menjadi badan hukum dengan capaian 149,64 %, Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat dengan capaian 100 %, Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP dengan capaian 105,59 dan Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru) dengan capaian 113,73 %. Sehingga dapat di analisa bahwa efisiensi penggunaan sumberdaya tahun 2016 adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.9
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (100-6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan moda	Prosentase keikutsertaan kabupaten/ kota dalam WTN	<i>persen</i>	106,66	95.89	10.77

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (100-6)
	transportasi umum	Prosentase kepemilikan armada angkutan umum {AKDP} perseorangan menjadi badan hukum	<i>persen</i>	149,64	28,85	120.79
		Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat	<i>persen</i>	100,00	71,60	28.4
2	Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi	Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP	<i>persen</i>	104,53	93,05	11.48
		Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)	<i>persen</i>	113,72	56,74	56.98
RATA-RATA				114.91	69.23	45.68

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, diolah

Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk efisiensi sumber daya dari capaian 5 (lima) indikator yang $\geq 100\%$ adalah 45.68 % dengan rata-rata persentase penyerapan anggaran sebesar 69.23%. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi pelaksanaan program/kegiatan. Apabila dilihat dari sisi lain, maka sasaran kinerja ini memiliki tingkat efisiensi anggaran.